



**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029**

**DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025**



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 3

 1.3. Maksud dan Tujuan 4

 1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 6

 2.1. Gambaran Pelayanan 6

 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 6

 2.1.2. Sumber Daya Perdagangan 16

 2.1.3. Kinerja Pelayanan 19

 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan 25

 2.1.5. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD.....26

 2.2. Permasalahan Dan Isu Strategi 26

 2.2.1. Identifikasi Permasaahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Pelayanan Dinas Perdagangan 26

 2.2.2. Penentuan Isu Strategis 28

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 30

 3.1. Tujuan dan Sasaran..... 30

 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan..... 32

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 34

 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta kinerja, indikator,
 target dan pagu indikatif 34

 4.2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukung program
 prioritas 82

 4.3. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 88

 4.4. Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-202988

BAB V PENUTUP 90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Pendidikan	16
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai menurut Golongan	17
Tabel 2.3	Jumlah ASN menurut Jabatan eselon.....	18
Tabel 2.4	Aset Dinas Perdagangan	19
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul.....	21
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026	23
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul.....	27
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029	31
Tabel 3.2	Strategi Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja	32
Tabel 3.3	Penatahapan Renstra Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja. ..	32
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra PD	33
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029	35
Tabel 4.2	Rencana program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2025	53
Tabel 4.3	Sub Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Program Prioritas	83
Tabel 4.4	Indikator Sasaran Kinerja Utama Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029.....	88
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan.....	8
Gambar 2.2	Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	17
Gambar 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan	17
Gambar 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon	18

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri dari atas RPJPD, RPJMD, Renstra dan Renja OPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Gunungkidul, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya urusan perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki untuk dilaksanakan dan sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan guna penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah juga berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja.

Dalam hal penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja selaras dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 yakni misi kedua yaitu **"Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif"**.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja dengan RPJMD adalah bahwa RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pedoman perencanaan lima tahunan yang berisi program tahunan dengan tema dan prioritas berikut target kumulatif dan indikator pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Program dan target yang telah ditetapkan menjadi acuan bagi Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja untuk menjabarkannya dalam penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja. Dengan demikian, dokumen RPJMD Kabupaten menjadi pedoman penyusunan dan penetapan Renstra Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja, dan demikian sebaliknya pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja dalam rangka mencapai target dan sasaran yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029.

Rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja selama 5(lima) tahun ke depan kemudian diimplementasikan dan dijabarkan dalam target tahunan untuk mengetahui tingkat capaian setiap tahunnya. Implementasi dari target tahunan inilah yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagai arah dan pedoman Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan program kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di urusan perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi .

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja tahun 2025 – 2029 merupakan penajaman target-target yang akan dicapai sebagai konsekuensi logis dari adanya perubahan lingkungan strategis maupun kebijakan nasional yang ada sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025–2029 sebagai tindak lanjut dari RPJMD Kabupaten Gunungkidul.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 adalah pemulihan perekonomian dan pengurangan pengangguran akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada awal tahun 2020 yang berimbas pada aktivitas ekonomi baik secara mikro maupun makro.

Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja telah menyusun berbagai strategi dan langkah-langkah yang tertuang dalam dokumen Renstra, yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain dari sisi kebijakan dan strategi untuk merespon serta mendukung penanganan pemulihan perekonomian, target pada indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra juga disesuaikan dengan kondisi yang ingin dicapai 5 (lima) tahun mendatang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-20029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
20. *Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan.*
21. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal.
22. *Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar.*
23. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.2 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dan pedoman untuk mengarahkan pembangunan bidang perdagangan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
2. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah dalam periode waktu 5 (lima) tahun bidang perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi.
3. Sebagai langkah untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah daerah.

1.3.3 Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang Perdagangan dan Tenaga Kerja selama 5 (lima) tahun kedepan;
2. Memberikan kerangka landasan sekaligus tolok ukur bagi pencapaian tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja dalam kurun waktu tahun 2025-2029;
3. Sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat di bidang Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Sebagai media informasi kepada para pemangku kepentingan terkait rencana program dan kegiatan tahunan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja dalam

upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan
 - 2.1.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perdagangan
 - 2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas perdagangan
 - 2.2.2. Penentuan Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Dan Sasaran
- 3.2. Perumusan Strategi Dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.2 Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukung program prioritas
- 4.3 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029
- 4.4 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerjs

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Dalam melakukan transformasi kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021 untuk memperkuat program-program yang ditetapkan dalam Permendagri tersebut.

Kondisi eksisting saat ini, Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan ditindaklanjuti dengan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, kedudukan Dinas Perdagangan adalah unsur penunjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perdagangan.

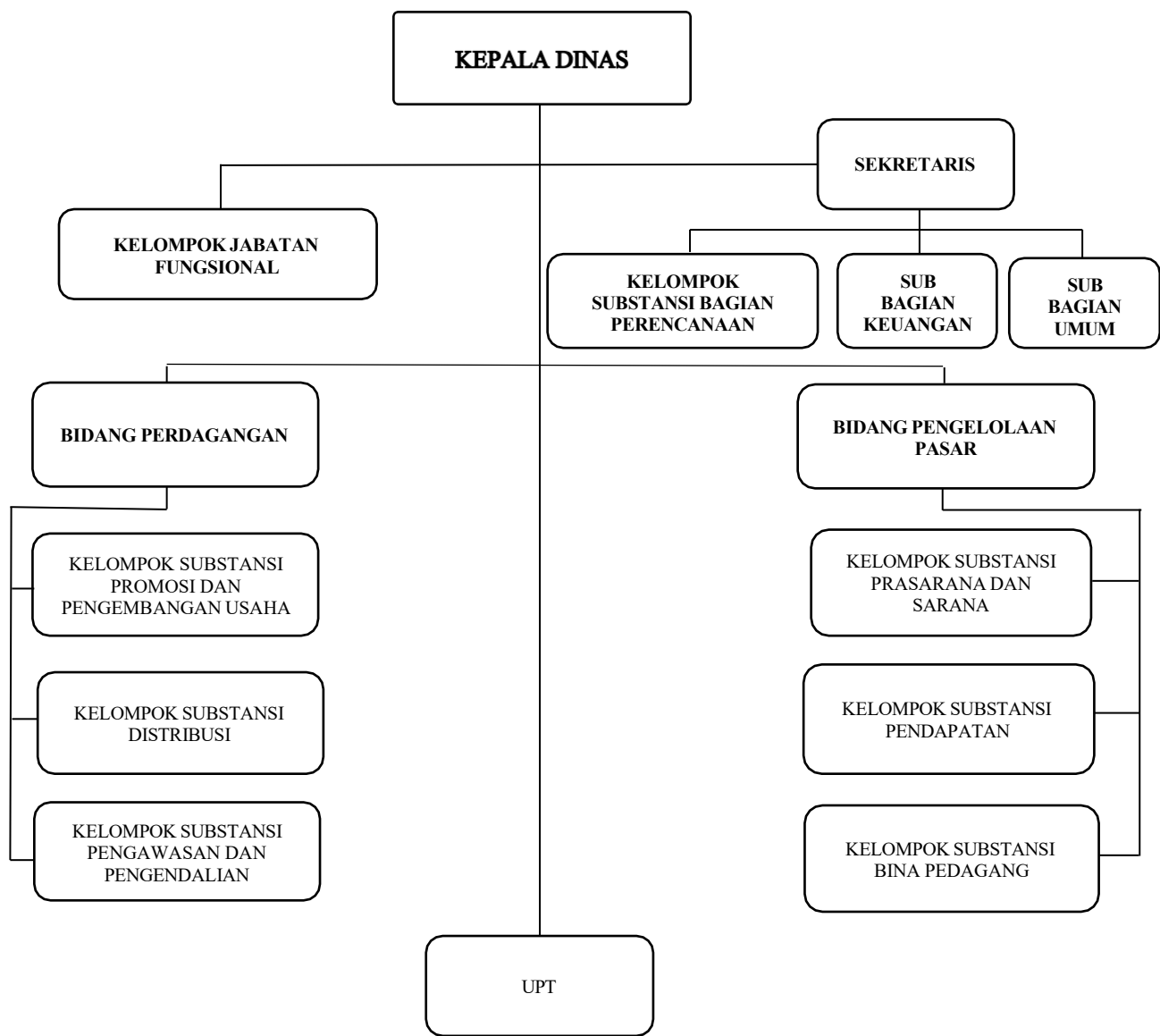
Adapun susunan organisasi Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari ;
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Kelompok Substansi Perencanaan;
- c. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 1. Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha;
 2. Kelompok Substansi Distribusi; dan
 3. Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian;
- d. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 1. Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana;
 2. Kelompok Substansi Pendapatan; dan
 3. Kelompok Substansi Bina Pedagang;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang perdagangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perdagangan;
- d. Pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
- e. Pelaksanaan pengenalan dan penerapan teknologi informasi perdagangan;
- f. Pembinaan dan pengembangan perdagangan elektronik/e-commerce;
- g. Pembinaan dan pengembangan ekspor daerah;
- h. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- i. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
- j. Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- k. Pelaksanaan operasi pasar;
- l. Pengawasan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- m. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- n. Pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal;
- o. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- p. Pelaksanaan monitoring bidang perdagangan;
- q. Pengoordinasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya Pemerintahan Dinas;
- r. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perdagangan;
- s. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang perdagangan;
- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perdagangan;
- u. Pengelolaan UPT; dan
- v. Pengelolaan kesekretariatan dinas.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan



Sumber: Subbag Umum Dinas Perdagangan, 2024

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT :
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif fungsional. Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
 - b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
 - c. Pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;

- e. Penyusunan rencana kerja sama;
- f. Penyusunan penetapan kinerja dinas;
- g. Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang perdagangan;
- i. Penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang perdagangan;
- j. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. Penyusunan laporan kinerja dinas;
- l. Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas;
- n. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- o. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
- p. Penyiapan bahan dan penatausahaan bidang perdagangan;
- q. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- r. Pelayanan administratif dan fungsional;
- s. Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan sekretariat;
- t. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
- u. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
- v. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Subbag Umum
- b. Subbag Keuangan
- c. Kelompok Substansi Perencanaan
 - 1. Sub Bagian Umum
 - 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan mengelola kepegawaian, kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah.
 - 2) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas;
 - f. penyusunan rincian tugas dinas;
 - g. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - h. pengelolaan barang milik daerah;
 - i. pengelolaan perpustakaan dinas;
 - j. pelaksanaan hubungan masyarakat;

- k. penyusunan rencana kerja sama;
- l. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik dinas;
- m. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- n. pengelolaan perjalanan dinas;
- o. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- p. pemberian pelayanan administrasi kepegawaian;
- q. pelaksanaan pengembangan pegawai;
- r. penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- s. penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- t. pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- u. penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- v. pelaksanaan reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Umum;
- w. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
- x. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
- y. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

2. Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian keuangan.
- 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan; b. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Keuangan; c. Pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas; d. Penyusunan laporan keuangan; e. pengelolaan administrasi pendapatan; f. penyiapan bahan perhitungan anggaran dinas; g. pelaksanaan reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Keuangan; h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Keuangan; i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan; dan j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan.

3. Kelompok Substansi Perencanaan

- 1) Kelompok Substansi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Kelompok Substansi Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;

- b. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan ;
- c. Penyusun rancangan kebijakan umum dinas;
- d. Pelaksanakan analisis dan penyajian data;
- e. Pengelolaam sistem informasi, pelayanan data dan informasi pembangunan di bidang perdagangan;
- f. Penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
- g. Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- i. Penyiapan bahan pengendalian kegiatan dinas;
- j. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- k. Penyusunan laporan kinerja dinas;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan;
- m. pelaksanaan reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Perencanaan;
- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan; dan
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan

2. BIDANG PERDADAGANGAN

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan promosi dan pengembangan usaha, distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen.

Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a.penyusunan rencana kegiatan bidang perdagangan;
- b.perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan pengembangan usaha, distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen;
- c.penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perdagangan;
- d.pelaksanaan promosi dan pengembangan usaha, distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta perlindungan konsumen;
- e.pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Keuangan Bidang Perdagangan;
- f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perdagangan;
- g.penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perdagangan; dan
- h.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Perdagangan.

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha
- b. Kelompok Substansi Distribusi, dan
- c. Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian

1. Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha
 - 1) Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan promosi dan pengembangan usaha.
 - 2) Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan pengembangan usaha;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha;
 - d. pelaksanaan fasilitasi perizinan dan/atau non perizinan di bidang usaha perdagangan;
 - e. penyusunan data usaha perdagangan;
 - f. pelaksanaan pendataan produk ekspor, dan produk potensial ekspor;
 - g. pelaksanaan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang;
 - h. pelaksanaan kampanye pencitraan produk;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
 - j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ekspor daerah;
 - k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan teknologi informasi perdagangan;
 - l. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perdagangan elektronik/e-commerce;
 - m. pelaksanaan reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha;
 - n. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha;
 - o. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang promosi dan pengembangan usaha; dan
 - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha.
2. Kelompok Substansi Distribusi
 - 1) Kelompok Substansi Distribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan distribusi.
 - 2) Kelompok Substansi Distribusi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Distribusi;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang distribusi;

- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Distribusi;
 - d. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - f. pelaksanaan pemantauan harga kebutuhan pokok dan barang penting;
 - g. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - j. pelaksanaan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - k. pelaksanaan publikasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Distribusi;
 - m. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Distribusi;
 - n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang distribusi; dan
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Distribusi.
3. Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian
- 1) Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan perdagangan, pengendalian, standarisasi, dan perlindungan konsumen.
 - 2) Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - d. pelaksanaan monitoring kepemilikan legalitas usaha di bidang perdagangan;
 - e. pelaksanaan pengawasan metrologi legal;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kerjasama metrologi legal;
 - g. pelaksanaan pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
 - h. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;

- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian;
- j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian;
- k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengawasan dan pengendalian;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian.

3. BIDANG PENGELOLAAN PASAR

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pengelolaan prasarana dan sarana, pendapatan bukan pajak, dan pembinaan pedagang pasar.

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Pasar;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pengelolaan pasar;
- d. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana, pendapatan bukan pajak, pasar, serta pembinaan keamanan dan ketertiban pasar;
- e. pengoordinasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Pengelolaan Pasar;
- f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pengelolaan pasar;
- g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pasar; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengelolaan pasar.

Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana;
- b. Kelompok Substansi Pendapatan;
- c. Kelompok Substansi Bina Pedagang, Keamanan, dan Ketertiban.

1. Kelompok Substansi Prasarana dan sarana

1) Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar.

2) Kelompok Substansi Prasana dan Sarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana;

- d. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pasar serta pedagang kaki lima;
 - e. pelaksanaan analisis dan penyajian data pengelolaan prasarana dan sarana pasar serta pedagang kaki lima;
 - f. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana;
 - h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang prasarana dan sarana; dan
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana.
2. Kelompok Substansi Pendapatan
- 1) Kelompok Substansi Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pendapatan pasar dan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pasar.
 - 2) Kelompok Substansi Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pendapatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Pendapatan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan pendapatan pasar;
 - e. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pasar;
 - f. pengoordinasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, budaya pemerintahan Kelompok Substansi Pendapatan;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Pendapatan;
 - h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendapatan; dan
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Pendapatan.
3. Kelompok Substansi Bina Pedagang
- 1) Kelompok Substansi Bina Pedagang mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang penataan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima.
 - 2) Kelompok Substansi Bina Pedagang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Bina Pedagang;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang bina pedagang;

- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Bina Pedagang;
 - d. pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
 - e. pelaksanaan pengelolaan data pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki lima;
 - g. pengoordinasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, budaya pemerintahan Kelompok Substansi Bina Pedagang;
 - h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Bina Pedagang;
 - i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bina pedagang; dan
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Bina Pedagang.
4. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

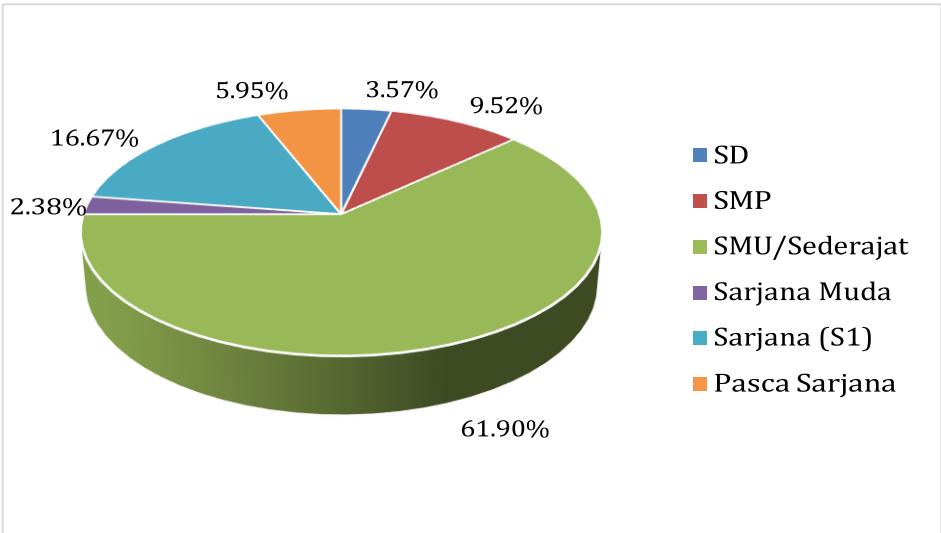
2.1.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 didukung dengan personil sebanyak 164 orang (Laki-laki 111 dan Perempuan 53) terdiri dari ASN sebanyak 75 orang, Non ASN sebanyak 89 orang. Kondisi Kepegawaian pada Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perdagangan menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	3 orang
2.	SMP	4 orang
3.	SLTA	40 orang
4.	Sarjana Muda	1 orang
5.	Sarjana (S-1)	23 orang
6.	Pasca Sarjana (S-2)	4 orang
	Jumlah	75 Orang

Sumber : Subbag Umum Dinas Perdagangan 2024



Sumber : Subbag Umum Dinas Perdagangan 2024

Gambar 2.2

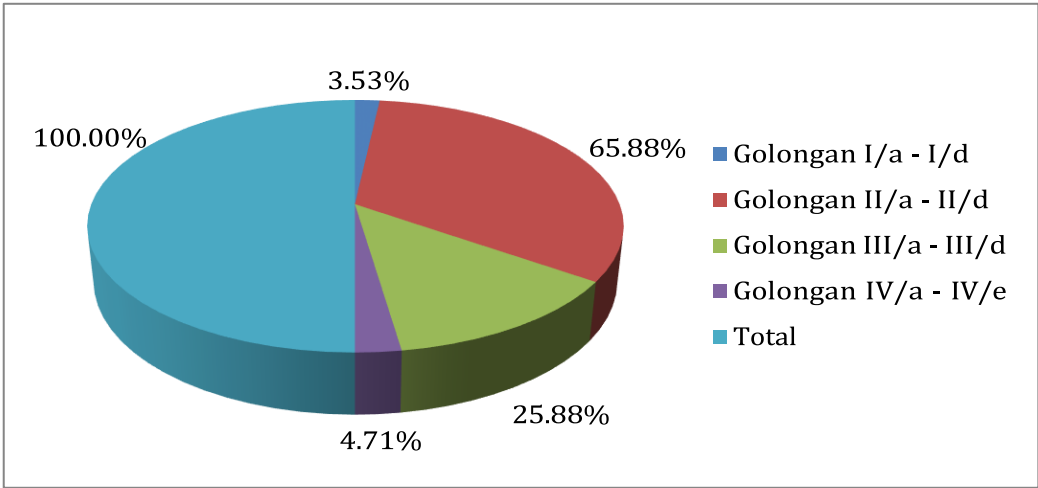
Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai menurut Golongan

No.	Golongan/Ruang	Bezetting 31-12-2024
1	PPPK	4
2	I/a – I/d	2
3	II/a – II/d	23
4	III/a – III/d	43
5	IV/a – IV/e	3
	Jumlah	75

Sumber : Subbag Umum Dinas Perdagangan 2024



Sumber : Subbag Umum Dinas Perdagangan 2024

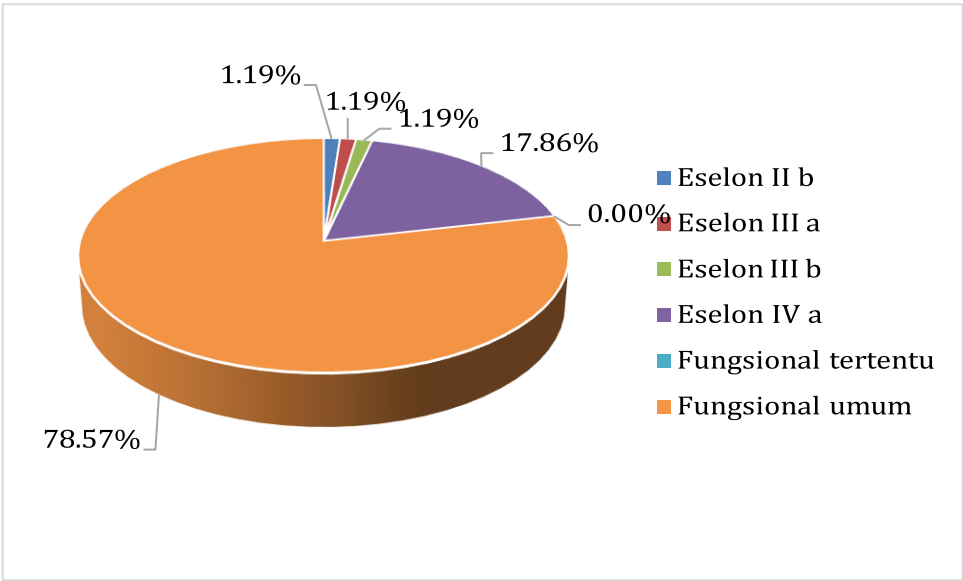
Gambar 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Tabel 2.3
Jumlah ASN menurut Jabatan eselon

No	Jabatan (Eselon)	Jumlah	Keterangan
1.	II b	1 orang	Kepala Dinas
2.	III a	1 orang	Sekretaris Dinas
3.	III b	1 orang	Kepala Bidang
4.	IV a	5 orang	Kasubbag dan Ka UPT
5.	Fungsional tertentu	6 orang	
6.	Fungsional umum	61 orang	
	Jumlah	75 orang	

Sumber : Subbag Umum Dinas Perdagangan 2024



Sumber : Subbag Umum Dinas Perdagangan 2024

Gambar 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon

Berdasarkan analisa kebutuhan pegawai, Dinas Perdagangan membutuhkan 271 ASN, yang terdiri dari pejabat struktural, jabatan fungsional umum, fungsional tertentu, dengan kondisi saat ini Jumlah ASN sebanyak 75 orang masih kekurangan 196 pegawai. Upaya yang dilakukan untuk menutup kekurangan pegawai yaitu dengan mengangkat tenaga kontrak sebanyak 2 orang dan tenaga harian lepas sebanyak 87 orang .

a. Data Perlengkapan dan peralatan kantor

Aset Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset lainnya. Nilai aset Dinas Perdagangan berdasarkan data aplikasi SIM ASet bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Aset Dinas Perdagangan

NO.	ASET	JML UNIT	NILAI ASET (RP)
1	Tanah	45	9.180.727.500,00
2	Peralatan dan Mesin	1.463	5.561.497.717,38
3	Gedung dan Bangunan	697	104.067.643.191,61
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	205	4.319.357.930,09
5	Aset tetap lainnya	23	9.517.200,00
6	Aset lainnya	322	22.644.107.730,35
Jumlah		2.755	145.782.851.270,43

Dalam rangka optimalisasi aset, Dinas Perdagangan juga telah melakukan kegiatan penilaian kembali Barang Milik Daerah (BMD) (sensus aset) pada tahun 2024. Tujuan dari sensus aset adalah untuk meningkatkan kualitas penyajian data nilai aset pada Laporan Keuangan, membangun database BMD yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMD, serta untuk mengidentifikasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan serta sarana dan prasarana lainnya yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan basis data yang akurat dan aktual.

Dinas Perdagangan mengalami keterbatasan jumlah kendaraan bermotor. Dengan jangkauan lokasi binaan di 40 pasar rakyat, toko swalayan, toko kelontong, dan pedagang kaki lima yang tersebar di 18 kecamatan, Dinas Perdagangan ditunjang dengan sarana kendaraan yang cukup. Kondisi saat ini, kendaraan roda 4 sejumlah 8 unit, yang kondisi baik sebanyak 5, sedangkan untuk kendaraan roda 2 jumlah total 30 unit yang dalam kondisi baik sejumlah 28 unit.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerjs

Capaian dari Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul periode 2021-2026 menjadi pijakan untuk melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil dan menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Selain capaian-capaian yang diraih Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan *stakeholders* kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029. Selanjutnya, dalam rangka melayani *stakeholders* serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di bidang perdagangan dan tenaga kerja, akan disusun potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul pada periode 5 (lima) tahun mendatang dan dirumuskan selanjutnya menjadi lebih responsif, efektif dan efisien.

Terkait dengan misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, Dinas Perdagangan berkontribusi pada misi 2 yaitu: “Meningkatkan pembangunan manusia penguatan keunggulan potensi daerah.” Dengan beberapa kebijakan yang diambil

seperti meningkatkan ketersediaan bahan pokok secara berkelanjutan dengan harga yang stabil, serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana pasar rakyat. Untuk mendukung misi tersebut Dinas Perdagangan diwujudkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang akan dicapai 5 (lima) tahun ke depan. Berikut target dan realisasi capaian IKU Dinas Perdagangan seperti dalam tabel di bawah ini .

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan	25%	5%	10%	15%	20%	25%	16,69%	21,97%	29,04%	N/A	N/A	3,34	2,20	1,94	N/A	N/A
2.	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai	45%	25%	30%	35%	40%	45%	25%	30%	35%	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A
3.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	75%	50%	55%	61%	68%	75%	44,50%	56,63%	61,42%	N/A	N/A	89%	102,96 %	100,68 %		
4.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	10,5%	12,2%	13,9%	15,6%	17,3%	17,3%	11,9%	13,61%	13,9%	N/A	N/A	113,33 %	111,55 %	100%		

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari target pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang ditunjukkan dengan 2 (dua) indikator kinerja utama maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator dapat mencapai target yang diharapkan bahkan untuk indikator pertumbuhan sektor perdagangan meningkat capaian realisasi kinerja melebihi target. Meskipun dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih dijumpai banyak kendala namun dapat diupayakan penyelesaiannya sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

1. Komitmen dari pelaku kegiatan dengan dibantu oleh dinas/instansi terkait sehingga seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan;
3. Semakin terbukanya peluang untuk promosi dan pemasaran produk IKM baik offline maupun online;
4. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021-2026

Uraian	Target Renstra pada tahun ke-					Realisasi Capaian pada tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
	2022 Rp. (000)	2023 Rp. (000)	2024 Rp. (000)	2025 Rp. (000)	2026 Rp. (000)	2022 Rp. (000)	2023 Rp. (000)	2024 Rp. (000)	2025 Rp. (000)	2026 Rp. (000)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	Anggaran Rp. (000)	Realisasi Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.541.292	8.705.160	8.704.949	9.057.729	9.321.265	8.411.446	5.878.710	5.775.568	n/a	n/a	87,11	89,57	95,07	85,86		41.973	33.292
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	350.000	845.000	870.000	895.000	920.000	350.000	500.000	550.000	n/a	n/a	-	-	99,97	-		0	0
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	5.000	18.000	19.000	19.950	20.948	4.958	12.150	5.760	n/a	n/a	86,91	99,13	98,68	98,79		(27.931)	(23.163)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.317.317	3.065.000	3.295.000	3.440.000	3.672.750	3.257.683	4.042.141	3.043.027	n/a	n/a	86,42	88,51	99,98	100,00		(16.083)	(13.854)
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	75.585	78.000	84.500	88.725	93.161	78.965	151.192	195.432	n/a	n/a	52,32	86,90	95,40	99,04		(1.541)	(709)

Uraian	Target Renstra pada tahun ke-					Realisasi Capaian pada tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
	2022 Rp. (000)	2023 Rp. (000)	2024 Rp. (000)	2025 Rp. (000)	2026 Rp. (000)	2022 Rp. (000)	2023 Rp. (000)	2024 Rp. (000)	2025 Rp. (000)	2026 Rp. (000)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	Anggaran Rp. (000)	Realisasi Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	265.000	257.500	475.000	533.250	587.075	324.954	187.658	113.522	n/a	n/a	98,78	86,79	97,01			(3.932.604)	(3.886.066)
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	184.350	255.000	262.500	268.500	294.500	230.766	313.691	205.367	n/a	n/a	94,18	98,80	84,48			(477.004)	(448.039)
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	150.810	105.000	125.250	131.513	138.088	151.164	103.870	89.559	n/a	n/a	98,15	100,00	100,00			4.290	4.340
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	531.354	542.170	92.267	500.895		523.172	535.595	90.695	n/a	n/a	98,46	98,79	98,30			383.154	33,33
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.516.050	10.579.300	20.998.532	576.310		3.215.601	10.251.721	20.762.256	n/a	n/a	91,45	96,90	98,87			11.409.859	33,33
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	155.550	122.405	102.792	114.815		154.952	121.847	101.960	n/a	n/a	99,62	99,54	99,19			126.253	33,33
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	282.000	170.240	72.022	103.680		281.705	169.159	70.499	n/a	n/a	99,90	99,37	97,88			173.787	33,33

Berdasarkan tabel 2.6 di atas, dapat dijelaskan bahwa anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan PD pada pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami naik turun. Perbandingan/rasio realisasi anggaran pendanaan per program kegiatan mengalami naik turun. Ketersediaan anggaran ini tentunya dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah

Secara umum bisa dikatakan bahwa kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD berjalan dengan baik seluruh program dan kegiatan telah terlaksana dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain :

1. Jumlah dan kualitas SDM.
2. Penyederhanaan/prosedur pelaksanaan program.
3. Pemantauan progres pelaksanaan program.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan maka selain memberikan layanan bidang perdagangan kepada masyarakat umum, Dinas Perdagangan juga memberikan layanan kepada beberapa kelompok sasaran yaitu :

- Pedagang pasar, PKL (Pedagang Kaki Lima) dan Pedagang COD mengelola 38 Pasar Rakyat, 1 Taman Kuliner dan 1 Taman Parkir yang ditempati oleh kurang lebih 10.171 pedagang. PKL yang tergabung dalam APKLI kurang lebih ada 750 pedagang. Pada tahun 2023 mulai melayani pedagang yang tergabung dalam Forum Pedagang COD
- IKM yang berorientasi ekspor
Dalam pelayanan ini memberikan pelatihan ekspor dan memberikan fasilitas promosi produk pada pameran yang berskala nasional.
- UMKM yang sudah berkembang
Dalam pelayanan ini memfasilitasi UMKM yang sudah berkembang untuk melakukan promosi produk tingkat daerah dalam bentuk bazar-bazar.
- Pelaku usaha yang mempunyai alat ukur/alat timbangan
UPT Metrologi Legal memberikan pelayanan kepada pelaku usaha berupa tera/tera ulang alat ukur/alat timbang, yang sampai saat ini baru 12% pelaku usaha yang melakukan tera/tera ulang secara periodik
- Pelaku usaha perdagangan (agen, distributor, toko swalayan, toko modern dll)
- Masyarakat umum angkatan kerja dengan pelayanan berupa pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, dilaksanakan oleh UPT Balai Latihan Kerja
- Pegawai/buruh perusahaan dalam bentuk pendampingan hak-hak pekerja sedangkan bentuk layanan kepada perusahaan dalam bentuk pendampingan-pendampingan pengelolaan perusahaan yang melindungi pekerjanya.
- Masyarakat peminat transmigrasi.
Kuota jumlah yang ditempatkan pada daerah tujuan transmigrasi ditentukan oleh propinsi, kabupaten hanya memfasilitasi cek lokasi, persiapan pemberangkatan, pengawalan pengiriman dan monitoring

2.1.5. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam Pelaksanaan program kegiatan, Bank Pembangunan Daerah DIY (BPD DIY) dan Bank Daerah Gunungkidul (BDG) adalah mitra dalam memberikan pelayanan. Dukungan dalam bentuk barang ataupun dana sering diberikan kepada dinas guna memperlancar pelaksanaan kegiatan.

Dukungan dalam bentuk barang misalnya tenda untuk kegiatan bazar, rompi untuk identitas petugas pungut dan petugas keamanan pasar, tempat sampah dan lain-lain. Sedangkan dukungan dalam bentuk dana diberikan jika ada even besar yang dilaksanakan perangkat daerah misalnya Gelar Potensi Daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang akan dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau adanya kesenjangan antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi serta akar masalahnya. Hal ini menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan perangkat daerah.

Guna mendapatkan potret gambaran tentang kondisi saat ini dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Berikut dijabarkan secara rinci permasalahan tersebut seperti terlihat pada tabel 2.7 :

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengembangan sektor perdagangan	Belum optimalnya kegiatan perdagangan	1. Database Toko Swalayan, Toko Modern dan Gudang yang belum update; 2. Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif; 3. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk; 4. Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang illegal belum optimal 5. Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya yang sangat dinamis;
		Belum optimalnya pengelolaan pasar	1. Turunnya jumlah pengunjung pasar rakyat; 2. Pembangunan dan pemeliharaan fisik, ekonomi, dan sosial pasar rakyat belum optimal; 3. Semakin menjamurnya toko modern dan swalayan serta toko online 4. Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal; 5. Aksesibilitas modal pedagang pasar rendah; 6. Pedagang pasar belum siap untuk menggunakan platform e-commerce.
		Belum optimalnya layanan kemetrologian legal	1. Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal; 2. SDM penera sangat kurang ; 3. Database UTTP belum valid; 4. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal tertib ukur masih kurang.
		Masih rendahnya daya saing produk daerah baik secara regional maupun internasional	1. Kurangnya fasilitas promosi, pemasaran produk dan branding ; 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk lokal; 3. Belum adanya ekspor mandiri dari Gunungkidul;
2.	Pemberi kerja belum sepenuhnya menerapkan ketentuan peraturan ketenagakerjaan;	Kurangnya partisipasi aktif dari perusahaan dalam pembinaan peraturan ketenagakerjaan	Lemahnya pemahaman manfaat peraturan ketenagakerjaan
3.	Kepesertaan Program Jaminan Sosial Bidang ketenagakerjaan belum optimal;	Kurangnya partisipasi aktif dari pekerja dan pemberi kerja	Lemahnya pemahaman manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
4.	Target penurunan angka pengangguran belum tercapai.	Keterbatasan lowongan kerja kerja di Kab. Gk	
5.		Belum adanya pejabat Fungsional Pengantar Kerja	
6.	Penyebaran informasi transmigrasi belum merata dan efektif; dan	Karena Jumlah personil dan kemampuan penyampaian informasi secara menyeluruh masih terbatas	Kurangnya sosialisasi transmigrasi
7.	Kesepakatan kerjasama antar daerah bidang transmigrasi belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Transmigrasi.	Kelemahan dalam hal Advokasi penyelesaian masalah dalam kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antar daerah	Legalitas lahan kawasan transmigrasi
8.	Pelayanan penempatan tenaga kerja belum optimal;	Keterbatasan lowongan pekerjaan di Gunungkidul	
9.	Informasi pasar kerja belum optimal;	Kurangnya mediasi antara pemberi kerja dan pencari kerja	
10.	Ketersediaan data terkait ketenagakerjaan belum optimal;	Keterbatasan personal dan anggaran	

2.2.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam perumusannya isu strategis daerah dianalisis berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah.

Tabel 2.8
ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Perdagangan	Kegiatan perdagangan masih berskala lokal, pelaku usaha kurang memanfaatkan teknologi sebagai alat pemasaran, serta pemantauan arus komoditas dan pelaku perdagangan masih rendah	Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan kesempatan berusaha	perang tarif perdagangan	defisit neraca perdagangan	kemandirian ekspor pelaku perdagangan	peningkatan skala perdagangan
	Kondisi dan sumber daya pasar masih rendah	Terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur				
	Layanan kemetrolagian legal terkendala minimnya jumlah petugas penera					
Tenaga Kerja	Keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri	peningkatan kesempatan berusaha yang masih rendah	Industri global bergerak cepat dengan hadirnya perkembangan teknologi , tren industri, dan otomatisasi, AI, big data, dan Internet of Things (IoT)	Minimnya Kolaborasi Antara Industri dan Lembaga Pelatihan	Kurangnya Data dan Informasi Pasar Kerja Lokal	link and match antara pendidikan/pelatihan dan dunia kerja
	Rendahnya daya saing tenaga kerja karena kualitas tenaga kerja yang rendah, di mana jumlah penduduk usia kerja didominasi oleh lulusan SD dan SMP.		Perusahaan multi nasional banyak yang pindah ke negara lain yang lebih kompetitif (Vietnam)	Perusahaan dalam negeri banyak yang pailit	Produktivitas tenaga kerja rendah	Penyiapan tenaga kerja yang berkualitas

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor perdagangan dan tenaga kerja menuju terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja, pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan mewujudkan visi dalam melaksanakan misi untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dari suatu tujuan oleh Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam perumusan sasaran dirancang pula indikator sasaran sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Pengertian yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahun secara berkesinambungan sejalan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran untuk mengukur tujuan pertama merupakan perspektif pembelajaran organisasi, sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan kedua merupakan perspektif pemangku kepentingan.

Bertitik tolak dengan hal tersebut maka tujuan yang ingin dicapai Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul adalah: “ ***Terwujudnya daya saing sektor perdagangan dan tenaga kerja***”

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja dalam Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
 Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	Terwujudnya daya saing sektor perdagangan dan tenaga kerja		Indeks daya saing sektor perdagangan dan tenaga kerja	78,73	79,24	79,95	80,71	81,52	82,38	
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	PDRB Sektor Perdagangan	8,66-8,84	8,68-8,89	8,70-8,94	8,72-8,99	8,74-9,04	8,76-9,09	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	62,2	63	64,2	65,5	66,9	68,4	

3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi Renstra PD merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran PD. Strategi PD dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD dengan melihat faktor eksternal dan internal.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Strategi Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Visi	Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban	
Misi	Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif	
Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya daya saing sektor perdagangan dan tenaga kerja	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, dan pengelolaan persaingan usaha, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2. Peningkatan tatakelola pemberian rekomendasi perizinan usaha bidang perdagangan 3. Fasilitasi promosi dan pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha, pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan; 4. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja untuk menciptakan Tenaga Kerja terdidik dan terlatih, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja

Tahapan melaksanakan langkah-langkah strategi secara tahunan sangat diperlukan agar rencana tindakan lebih fokus dan terarah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja dapat dilihat dalam Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Peningkatan pondasi pembangunan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing di bidang perdagangan dan tenaga kerja	Percepatan pondasi pembangunan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing di bidang perdagangan dan tenaga kerja	Penguatan pondasi pembangunan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing di bidang perdagangan dan tenaga kerja	Pemantapan pondasi pembangunan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing di bidang perdagangan dan tenaga kerja	Optimalisasi pondasi pembangunan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing di bidang perdagangan dan tenaga kerja

Arah kebijakan Renstra PD 2025-2029 merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD. Arah kebijakan Renstra PD juga harus selaras dengan strategi PD dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029 tersaji dalam tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yaitu Sistem online untuk memantau dan melaporkan harga barang penting	Meningkatkan efektivitas pengendalian harga dan ketersediaan pasokan barang pokok penting	Peningkatan distribusi dan stabilisasi harga barang pokok/barang penting	
2.	Regulasi, pengawasan, dan dukungan terhadap pelaku usaha termasuk memastikan kualitas produk, melindungi konsumen, dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif	Meningkatkan daya saing produk daerah di tingkat regional dan internasional	Fasilitasi promosi dan pemasaran termasuk melakukan pendampingan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaku usaha, pedagang pasar da PKL secara berkesinambungan	
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat	Mengoptimalkan pengelolaan pasar agar lebih tertata dan efisien	Pembangunan dan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan	
4.	Pengawasan terhadap alat ukur, takar, dan timbang untuk memastikan keakuratan dan keandalan pengukuran	Meningkatkan kualitas layanan kemetrologian legal	Peningkatan kapasitas SDM maupun sarpras metrologi dan eningkatan pengawasan kegiatan perdagangan	
5.	Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelatihan tenaga kerja, memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan memenuhi standar yang ditetapkan, tenaga kerja yang dihasilkan memiliki kompetensi yang lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas serta daya saing di pasar kerja	Meningkatkan relevansi kurikulum dan metode pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja	Menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan praktis, sehingga lulusan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja	
		Meningkatkan pelayanan pelatihan bagi angkatan kerja	Meningkatkan Pendampingan Perusahaan yang ada didaerah	
		Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja	Meningkatkan kualitas dan relevansi pelatihan, peningkatan aksesibilitas, serta peningkatan sinergi antara pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN
DAN
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasional rencana pendanaan harus dituangkan kedalam program/ kegiatan/ sub kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dalam tabel 4.1 dan 4.2 berikut :

Tabel 4.1

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENSTRA DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	Terwujudnya daya saing sektor perdagangan dan tenaga kerja				Indeks daya saing sektor perdagangan dan tenaga kerja		
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB			PDRB Sektor Perdagangan		
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran perusahaan		Persentase Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Yang Diawasi	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				<i>pengawasan terhadap Pelaku usaha dalam perizinan dan pendaftaran perusahaan</i>	<i>Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik</i>	<i>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</i>	
					Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)</i>	<i>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
			Meningkatnya omset pasar rakyat		Persentase pertumbuhan Omset pasar rakyat	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				<i>Sarana dan prasana pasar rakyat yang memadai</i>	<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				<i>Laporan Penadapatan Pasar</i>	<i>Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>		
					Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Komunitas Pasar yang mendapat pembinaan</i>	<i>Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	
					Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya validitas data distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				<i>Laporan ketersediaan barang pokok dan barang penting</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>	<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				<i>Laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</i>	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</i>	<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota</i>	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Laporan pengawasan kelengkapan legalitas dokumen perizinan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi</i>	<i>Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>	<i>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
					Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Persentase pelaku usaha yang berorientasi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				<i>Fasilitasi pelaku usaha berorientasi ekspor</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i>	<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pameran Dagang Nasional	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Misi Dagang bagi Pelaku Ekspor Unggulan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya tertib ukur Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan		Persentase UTP yang ditera/tera ulang	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				<i>Laporan kemetrologian</i>	<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
			Meningkatnya pemasaran produk IKM		Persentase peningkatan omset IKM	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				<i>Fasilitasi promosi produk UMKM</i>	<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai AKIP PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				<i>Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> <i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i> <i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i> <i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i> <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				<i>Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				<i>Dokumen Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				<i>Dokumen Administrasi Umum</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> <i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i> <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				<i>Dokumen laporan Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				<i>Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<i>Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan		
			Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Bidang Perdagangan		Jumlah Angkatan Kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerja istimewa	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				<i>Unit Usaha yang difasilitasi dalam Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</i>	<i>Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan</i>	<i>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</i>	
					Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Pengembangan Industri Kreatif	
			Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di UPT Balai Latihan Kerja		Jumlah Angkatan Kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerja istimewa		
				<i>Kaum perempuan yang dilatih dalam pengembangan perekonomian</i>	<i>Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya</i>	<i>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	Pengembangan Ekonomi Perempuan	
			Capaian Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				<i>Dokumen Rencana Tenaga kerja</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro</i>	<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</i>	
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
			Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja		Persentase kelulusan peserta pelatihan vokasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				<i>Pencari kerja yang meningkat kompetensinya</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan Kompetensi pada Tahun n Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>	<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
					Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
					Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
				<i>Lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi</i>	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Tingkat Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				<i>pencari kerja yang ditempatkan</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>	<i>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Tingkat Kesempatan Kerja</i>	<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>	<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	
			Meningkatnya perlindungan bagi pekerja		Persentase pekerja yang mendapat perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama</i>	<i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online</i>	<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
				<i>perselisihan hubungan industrial yang dicegah</i>	<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi Jumlah LKS Tripartit yang Dibina Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>	<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
			Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi		Persentase Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				<i>Transmigran yang terfasilitasi pemberangkatan dan penempatannya</i>	<i>Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan</i> <i>Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya</i> <i>Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan</i> <i>Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran</i> <i>Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi</i>	<i>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	
					Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	
					Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	Cek Kesehatan Calon Transmigran	
					Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				682.061.500,00		1.488.780.100,00		1.330.846.100,00		1.439.848.900,00		1.390.148.900,00		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				6.700.000,00		11.200.000,00		11.570.000,00		11.830.000,00		12.130.000,00		
Capaian dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	87.50	87.50	6.700.000,00	87.50	11.200.000,00	87.50	11.570.000,00	87.50	11.830.000,00	87.50	12.130.000,00	3.30.2.07.3.32.01 .00 00 - Dinas Perdaganga n dan Tenaga Kerja	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				6.700.000,00		11.200.000,00		11.570.000,00		11.830.000,00		12.130.000,00		
Dokumen Rencana Tenaga kerja	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	0	25	6.700.000,00	3	11.200.000,00	4	11.570.000,00	5	11.830.000,00	6	12.130.000,00		
	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0	1		1		1		1		1			
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				3.250.000,00		3.850.000,00		3.950.000,00		4.150.000,00		4.250.000,00		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0	1	3.250.000,00	1	3.850.000,00	1	3.950.000,00	1	4.150.000,00	1	4.250.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				3.450.000,00		7.350.000,00		7.620.000,00		7.680.000,00		7.880.000,00		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	0	25	3.450.000,00	3	7.350.000,00	4	7.620.000,00	5	7.680.000,00	6	7.880.000,00		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				510.406.500,00		1.169.220.100,00		1.049.916.100,00		1.129.658.900,00		1.079.658.900,00		
Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Persentase kelulusan peserta pelatihan vokasi	100	100	510.406.500,00	100	1.169.220.100,00	100	1.049.916.100,00	100	1.129.658.900,00	100	1.079.658.900,00	3.30.2.07.3.32.01. 00 00 - Dinas Perdaganga n dan Tenaga Kerja	
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				503.326.500,00		1.164.620.100,00		1.045.316.100,00		1.125.058.900,00		1.075.058.900,00		
Pencari kerja yang meningkat kompetensinya	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0	0	503.326.500,00	27	1.164.620.100,00	11	1.045.316.100,00	11	1.125.058.900,00	11	1.075.058.900,00		
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32	64		288		288		288		320			
	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	6	3		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				373.326.500,00		903.870.100,00		848.966.100,00		949.308.900,00		949.308.900,00		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32	64	373.326.500,00	288	903.870.100,00	288	848.966.100,00	288	949.308.900,00	320	949.308.900,00		
2.07.03.2.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				130.000.000,00		165.750.000,00		120.750.000,00		125.750.000,00		125.750.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	6	3	130.000.000,00	4	165.750.000,00	4	120.750.000,00	4	125.750.000,00	4	125.750.000,00		
2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota				-		95.000.000,00		75.600.000,00		50.000.000,00		-		
Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0	0	-	27	95.000.000,00	11	75.600.000,00	11	50.000.000,00	11	-		
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				7.080.000,00		4.600.000,00		4.600.000,00		4.600.000,00		4.600.000,00		
Lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	0	14	7.080.000,00	14	4.600.000,00	14	4.600.000,00	14	4.600.000,00	14	4.600.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				7.080.000,00		4.600.000,00		4.600.000,00		4.600.000,00		4.600.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Swasta	0	14	7.080.000,00	14	4.600.000,00	14	4.600.000,00	14	4.600.000,00	14	4.600.000,00		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				69.717.500,00		141.385.000,00		127.385.000,00		141.385.000,00		141.385.000,00		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	4.80	0.8	69.717.500,00	1.2	141.385.000,00	1.3	127.385.000,00	1.4	141.385.000,00	1.5	141.385.000,00	3.30.2.07.3.32.01. 00 00 - Dinas Perdaganga n dan Tenaga Kerja	
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				2.500.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		
pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	6448	50	2.500.000,00	50	1.750.000,00	50	1.750.000,00	50	1.750.000,00	50	1.750.000,00		
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				2.500.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	6448	50	2.500.000,00	50	1.750.000,00	50	1.750.000,00	50	1.750.000,00	50	1.750.000,00		
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				67.217.500,00		139.635.000,00		125.635.000,00		139.635.000,00		139.635.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
Tingkat Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	930	750	67.217.500,00	800	139.635.000,00	850	125.635.000,00	900	139.635.000,00	950	139.635.000,00		
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				67.217.500,00		139.635.000,00		125.635.000,00		139.635.000,00		139.635.000,00		
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	930	750	67.217.500,00	800	139.635.000,00	850	125.635.000,00	900	139.635.000,00	950	139.635.000,00		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				95.237.500,00		166.975.000,00		141.975.000,00		156.975.000,00		156.975.000,00		
Meningkatnya perlindungan bagi pekerja	Persentase pekerja yang mendapat perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	51.16	51.16	95.237.500,00	57.55	166.975.000,00	63.95	141.975.000,00	70.34	156.975.000,00	76.73	156.975.000,00	3.30.2.07.3.32.01.00 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.837.500,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	3	6	4.837.500,00	7	7.000.000,00	8	7.000.000,00	9	7.000.000,00	10	7.000.000,00		
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				4.837.500,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	3	6	4.837.500,00	7	7.000.000,00	8	7.000.000,00	9	7.000.000,00	10	7.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				90.400.000,00		159.975.000,00		134.975.000,00		149.975.000,00		149.975.000,00		
perselisihan hubungan industrial yang di cegah	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	1	90.400.000,00	1	159.975.000,00	1	134.975.000,00	1	149.975.000,00	1	149.975.000,00		
	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0	50		50		50		50					
	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2	2		2		2		2					
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4	4		4		4		4					
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.675.000,00		100.485.000,00		75.485.000,00		90.485.000,00		90.485.000,00		
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4	4	30.675.000,00	4	100.485.000,00	4	75.485.000,00	4	90.485.000,00	4	90.485.000,00		
2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				6.867.500,00		7.850.000,00		7.850.000,00		7.850.000,00		7.850.000,00		
Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2	2	6.867.500,00	2	7.850.000,00	2	7.850.000,00	2	7.850.000,00	2	7.850.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				47.720.000,00		46.640.000,00		46.640.000,00		46.640.000,00		46.640.000,00		
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	1	47.720.000,00	1	46.640.000,00	1	46.640.000,00	1	46.640.000,00	1	46.640.000,00		
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				5.137.500,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0	50	5.137.500,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00		
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				750.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				750.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Bidang Perdagangan	Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerja istimewa	100	100	750.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	3.30.2.07.3.32.01. 00 00 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	
2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				750.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Unit Usaha yang difasilitasi dalam Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	100	105	750.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
2.22.08.5.06.0003 - Pengembangan Industri Kreatif				750.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	100	105	750.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00		
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di UPT Balai Latihan Kerja	Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerja istimewa	-	-	-	48	100.000.000,00	48	100.000.000,00	48	100.000.000,00	48	100.000.000,00		
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Kaum perempuan yang dilatih dalam pengembangan perekonomian	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	NA	0	-	48	100.000.000,00	48	100.000.000,00	48	100.000.000,00	48	100.000.000,00		
2.22.08.5.07.0015 - Pengembangan Ekonomi Perempuan				-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	NA	0	-	48	100.000.000,00	48	100.000.000,00	48	100.000.000,00	48	100.000.000,00		
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				10.924.130.345,00		10.509.235.511,58		10.773.622.289,98		11.000.171.924,55		11.102.523.208,32		
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.346.114.819,00		6.282.401.971,58		6.471.622.289,98		6.594.171.924,55		6.634.173.208,32		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80.97	82	6.346.114.819,00	82.25	6.282.401.971,58	82.5	6.471.622.289,98	82.75	6.594.171.924,55	83	6.634.173.208,32	3.30.2.07.3.32.01.00 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	
3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				44.298.700,00		70.000.000,00		72.000.000,00		75.000.000,00		77.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			c	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	5	750.000,00	3	3.282.300,00	3	3.782.300,00	3	3.782.300,00	3	4.782.300,00		
3.30.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				750.000,00		3.282.300,00		3.782.300,00		3.782.300,00		4.782.300,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	5	750.000,00	3	3.282.300,00	3	3.782.300,00	3	3.782.300,00	3	4.782.300,00		
Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	17	43.548.700,00	17	66.717.700,00	17	68.217.700,00	17	71.217.700,00	17	72.217.700,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	2		2		2		2		3			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
3.30.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				37.155.000,00		48.155.000,00		48.155.000,00		48.655.000,00		49.155.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	2	37.155.000,00	2	48.155.000,00	2	48.155.000,00	2	48.655.000,00	3	49.155.000,00		
3.30.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				882.000,00		3.882.000,00		4.382.000,00		4.882.000,00		4.882.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2	882.000,00	1	3.882.000,00	1	4.382.000,00	1	4.882.000,00	1	4.882.000,00		
3.30.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				625.000,00		3.625.000,00		4.125.000,00		4.625.000,00		4.625.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2	625.000,00	1	3.625.000,00	1	4.125.000,00	1	4.625.000,00	1	4.625.000,00		
3.30.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				568.000,00		2.568.000,00		2.568.000,00		2.568.000,00		3.068.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	568.000,00	2	2.568.000,00	2	2.568.000,00	2	2.568.000,00	2	3.068.000,00		
3.30.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				468.700,00		2.637.700,00		3.137.700,00		3.637.700,00		3.637.700,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	468.700,00	2	2.637.700,00	2	3.137.700,00	2	3.637.700,00	2	3.637.700,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
3.30.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.850.000,00		5.850.000,00		5.850.000,00		6.850.000,00		6.850.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	17	3.850.000,00	17	5.850.000,00	17	5.850.000,00	17	6.850.000,00	17	6.850.000,00		
3.30.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.651.408.246,00		5.401.351.971,58		5.553.622.289,98		5.650.171.924,55		5.667.173.208,32		
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	13	13	5.651.408.246,00	13	5.401.351.971,58	13	5.553.622.289,98	13	5.650.171.924,55	13	5.667.173.208,32		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1218	75		1050		1050		1050		1050			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1			
3.30.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.604.703.446,00		5.344.647.171,58		5.486.917.489,98		5.578.467.124,55		5.590.468.408,32		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1218	75	5.604.703.446,00	1050	5.344.647.171,58	1050	5.486.917.489,98	1050	5.578.467.124,55	1050	5.590.468.408,32		
3.30.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.750.000,00		5.750.000,00		10.750.000,00		12.750.000,00		15.750.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1.750.000,00	1	5.750.000,00	1	10.750.000,00	1	12.750.000,00	1	15.750.000,00		
3.30.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				44.954.800,00		50.954.800,00		55.954.800,00		58.954.800,00		60.954.800,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13	44.954.800,00	13	50.954.800,00	13	55.954.800,00	13	58.954.800,00	13	60.954.800,00		
3.30.01.2.05 - Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah				6.562.500,00		12.500.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00		23.000.000,00		
Dokumen Administrasi Kepegawaiaan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	1	6.562.500,00	NA	12.500.000,00	3	17.000.000,00	3	20.000.000,00	3	23.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiaan	6	7		6		6		6		6			
3.30.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiaan				1.562.500,00		6.500.000,00		8.000.000,00		9.500.000,00		11.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiaan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiaan	6	7	1.562.500,00	6	6.500.000,00	6	8.000.000,00	6	9.500.000,00	6	11.000.000,00		
3.30.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5.000.000,00		6.000.000,00		9.000.000,00		10.500.000,00		12.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	1	5.000.000,00	NA	6.000.000,00	3	9.000.000,00	3	10.500.000,00	3	12.000.000,00		
3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				277.676.900,00		275.000.000,00		280.000.000,00		285.000.000,00		290.000.000,00		
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	277.676.900,00	12	275.000.000,00	12	280.000.000,00	12	285.000.000,00	12	290.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	250	250		250		250		250		250			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	21		6		6		6		6					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	10		6		6		6		6					
3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.742.000,00		3.742.000,00		4.142.000,00		4.142.000,00		4.142.000,00				
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	4	3.742.000,00	6	3.742.000,00	6	4.142.000,00	6	4.142.000,00	6	4.142.000,00				
3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				52.496.000,00		51.819.100,00		55.919.000,00		55.919.000,00		55.919.000,00				
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	21	52.496.000,00	6	51.819.100,00	6	55.919.000,00	6	55.919.000,00	6	55.919.000,00				
3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.259.000,00		5.259.000,00		5.759.000,00		5.759.000,00		5.759.000,00				
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	10	5.259.000,00	6	5.259.000,00	6	5.759.000,00	6	5.759.000,00	6	5.759.000,00				
3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.341.900,00		10.341.900,00		10.342.000,00		10.342.000,00		10.342.000,00				
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	18	10.341.900,00	36	10.341.900,00	36	10.342.000,00	36	10.342.000,00	36	10.342.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	250	250	1.200.000,00	250	1.200.000,00	250	1.200.000,00	250	1.200.000,00	250	1.200.000,00		
3.30.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00		
3.30.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				202.638.000,00		200.638.000,00		200.638.000,00		205.638.000,00		210.638.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	24	202.638.000,00	24	200.638.000,00	24	200.638.000,00	24	205.638.000,00	24	210.638.000,00		
3.30.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.512.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
Dokumen laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	2	9.512.000,00	7	30.000.000,00	7	50.000.000,00	7	55.000.000,00	7	60.000.000,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0				1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0				5		5		5			
3.30.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		5.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	-	5	5.000.000,00	5	10.000.000,00	5	12.000.000,00	5	15.000.000,00		
3.30.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.512.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	2	9.512.000,00	7	10.000.000,00	7	20.000.000,00	7	23.000.000,00	7	25.000.000,00		
3.30.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				182.506.473,00		225.000.000,00		230.000.000,00		235.000.000,00		240.000.000,00		
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	182.506.473,00	36	225.000.000,00	36	230.000.000,00	36	235.000.000,00	36	240.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12				12		12					
3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.055.140,00		80.420.140,00		82.920.140,00		85.920.140,00		88.920.140,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	80.055.140,00	36	80.420.140,00	36	82.920.140,00	36	85.920.140,00	36	88.920.140,00		
3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				102.451.333,00		144.579.860,00		147.079.860,00		149.079.860,00		151.079.860,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	102.451.333,00	12	144.579.860,00	12	147.079.860,00	12	149.079.860,00	12	151.079.860,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				174.150.000,00		268.550.000,00		269.000.000,00		274.000.000,00		277.000.000,00		
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	14	174.150.000,00	20	268.550.000,00	20	269.000.000,00	20	274.000.000,00	20	277.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	15		15		15		15					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1	0		1		1		1					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	420	329		420		420		420					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108	61		100		100		100		100			
3.30.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				143.600.000,00		200.000.000,00		200.450.000,00		200.450.000,00		200.450.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	420	329	143.600.000,00	420	200.000.000,00	420	200.450.000,00	420	200.450.000,00	420	200.450.000,00		
3.30.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				1.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	14	1.500.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00		
3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.550.000,00		24.550.000,00		24.550.000,00		29.550.000,00		32.550.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108	61	24.550.000,00	100	24.550.000,00	100	24.550.000,00	100	29.550.000,00	100	32.550.000,00		
3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	-	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.30.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.500.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	15	4.500.000,00	15	9.000.000,00	15	9.000.000,00	15	9.000.000,00	15	9.000.000,00		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				17.500.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Yang Diawasi	60	100	17.500.000,00	100	21.000.000,00	100	22.000.000,00	100	23.000.000,00	100	24.000.000,00	3.30.2.07.3.32.01.00 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				9.375.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00		12.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
pengawasan terhadap Pelaku usaha dalam perizinan dan pendaftaran perusahaan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIsistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	NA	5	9.375.000,00	5	10.500.000,00	5	11.000.000,00	5	11.500.000,00	5	12.000.000,00		
3.30.02.2.01.0002 - Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIsistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik				9.375.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIsistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	NA	5	9.375.000,00	5	10.500.000,00	5	11.000.000,00	5	11.500.000,00	5	12.000.000,00		
3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				8.125.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00		12.000.000,00		
Pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	13	5	8.125.000,00	5	10.500.000,00	5	11.000.000,00	5	11.500.000,00	5	12.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				8.125.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA- B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	13	5	8.125.000,00	5	10.500.000,00	5	11.000.000,00	5	11.500.000,00	5	12.000.000,00		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				3.805.347.026,00		3.300.708.540,00		3.328.875.000,00		3.340.000.000,00		3.372.350.000,00		
Meningkatnya omset pasar rakyat	Persentase pertumbuhan Omset pasar rakyat	3	2	3.805.347.026,00	2	3.300.708.540,00	2	3.328.875.000,00	2	3.340.000.000,00	2	3.372.350.000,00	3.30.2.07.3.32.01.00 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				3.643.121.526,00		3.100.708.540,00		3.128.875.000,00		3.140.000.000,00		3.172.350.000,00		
Laporan Pendapatan Pasar	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	40	40	2.492.830.066,00	40	2.087.708.540,00	40	2.037.708.540,00	40	2.044.708.540,00	40	2.050.058.540,00		
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2.492.830.066,00		2.087.708.540,00		2.037.708.540,00		2.044.708.540,00		2.050.058.540,00		
Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	40	40	2.492.830.066,00	40	2.087.708.540,00	40	2.037.708.540,00	40	2.044.708.540,00	40	2.050.058.540,00		
Sarana dan prasana pasar rakyat yang memadai	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	40	40	1.150.291.460,00	40	1.013.000.000,00	40	1.091.166.460,00	40	1.095.291.460,00	40	1.122.291.460,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.150.291.460,00		1.013.000.000,00		1.091.166.460,00		1.095.291.460,00		1.122.291.460,00		
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	40	40	1.150.291.460,00	40	1.013.000.000,00	40	1.091.166.460,00	40	1.095.291.460,00	40	1.122.291.460,00		
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				162.225.500,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Komunitas pasar yang mendapat pembinaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	25	12	162.225.500,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00		
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				162.225.500,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	25	12	162.225.500,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				170.310.000,00		125.000.000,00		140.000.000,00		181.000.000,00		196.000.000,00		
Meningkatnya validitas data distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100	100	170.310.000,00	100	125.000.000,00	100	140.000.000,00	100	181.000.000,00	100	196.000.000,00	3.30.2.07.3.32.01.00 00 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				112.310.000,00		105.000.000,00		118.000.000,00		156.000.000,00		168.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
Laporan ketersediaan barang pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4	4	112.310.000,00	4	105.000.000,00	4	118.000.000,00	4	156.000.000,00	4	168.000.000,00		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4	4		4		4		4		4			
3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				7.375.000,00		10.375.000,00		13.375.000,00		15.375.000,00		17.375.000,00		
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4	4	7.375.000,00	4	10.375.000,00	4	13.375.000,00	4	15.375.000,00	4	17.375.000,00		
3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				104.935.000,00		94.625.000,00		104.625.000,00		140.625.000,00		150.625.000,00		
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4	4	104.935.000,00	4	94.625.000,00	4	104.625.000,00	4	140.625.000,00	4	150.625.000,00		
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				45.500.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		
Laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	4	45.500.000,00	4	12.000.000,00	4	13.000.000,00	4	15.000.000,00	4	17.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				35.812.500,00		6.000.000,00		6.500.000,00		7.500.000,00		8.500.000,00		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	4	35.812.500,00	4	6.000.000,00	4	6.500.000,00	4	7.500.000,00	4	8.500.000,00		
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				9.687.500,00		6.000.000,00		6.500.000,00		7.500.000,00		8.500.000,00		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	12	9.687.500,00	12	6.000.000,00	12	6.500.000,00	12	7.500.000,00	12	8.500.000,00		
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				12.500.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		
Laporan pengawasan kelengkapan legalitas dokumen perizinan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5	5	12.500.000,00	5	8.000.000,00	5	9.000.000,00	5	10.000.000,00	5	11.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5	5		5		5		5		5			
3.30.04.2.03.0001 - Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				6.250.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		
Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5	5	6.250.000,00	5	4.000.000,00	5	4.500.000,00	5	5.000.000,00	5	5.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				6.250.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5	5	6.250.000,00	5	4.000.000,00	5	4.500.000,00	5	5.000.000,00	5	5.500.000,00		
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				149.203.500,00		350.000.000,00		380.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase pelaku usaha berorientasi ekspor	-	20	149.203.500,00	20	350.000.000,00	20	380.000.000,00	20	410.000.000,00	20	410.000.000,00	3.30.2.07.3.32.01. 00 00 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				149.203.500,00		350.000.000,00		380.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		
Fasilitasi pelaku usaha berorientasi ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	30	20	149.203.500,00	25	350.000.000,00	25	380.000.000,00	25	410.000.000,00	25	410.000.000,00		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	6	6		7		7		7		7			
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional				139.988.500,00		310.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	6	6	139.988.500,00	7	310.000.000,00	7	325.000.000,00	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				9.215.000,00		40.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	30	20	9.215.000,00	25	40.000.000,00	25	55.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				196.360.000,00		279.125.000,00		280.125.000,00		301.000.000,00		319.000.000,00		
Meningkatnya tertib ukur Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan	Persentase UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	12.12	12.73	196.360.000,00	13.33	279.125.000,00	13.94	280.125.000,00	14.55	301.000.000,00	15.15	319.000.000,00	3.30.2.07.3.32.01 .00 00 - Dinas Perdaganga n dan Tenaga Kerja	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				196.360.000,00		279.125.000,00		280.125.000,00		301.000.000,00		319.000.000,00		
Laporan kemetrolagian	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200	90	196.360.000,00	200	279.125.000,00	200	280.125.000,00	200	301.000.000,00	200	319.000.000,00		
	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4000	4400		4400		4600		4800		5000			
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				186.485.000,00		229.125.000,00		230.125.000,00		250.125.000,00		268.125.000,00		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4000	4400	186.485.000,00	4400	229.125.000,00	4600	230.125.000,00	4800	250.125.000,00	5000	268.125.000,00		
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				9.875.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.875.000,00		50.875.000,00		
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200	90	9.875.000,00	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00	200	50.875.000,00	200	50.875.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				239.295.000,00		151.000.000,00		151.000.000,00		151.000.000,00		147.000.000,00		
Meningkatnya pemasaran produk IKM	Persentase peningkatan omset IKM	-	10	239.295.000,00	10	151.000.000,00	10	151.000.000,00	10	151.000.000,00	10	147.000.000,00	3.30.2.07.3.32.01 .00 00 - Dinas Perdaganga n dan Tenaga Kerja	
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				239.295.000,00		151.000.000,00		151.000.000,00		151.000.000,00		147.000.000,00		
Fasilitasi promosi produk UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20	300	239.295.000,00	20	151.000.000,00	20	151.000.000,00	20	151.000.000,00	20	147.000.000,00		
	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	60	100		75		75		75		75			
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				128.255.000,00		100.742.000,00		100.742.000,00		100.742.000,00		100.742.000,00		
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	60	100	128.255.000,00	75	100.742.000,00	75	100.742.000,00	75	100.742.000,00	75	100.742.000,00		
3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				111.040.000,00		50.258.000,00		50.258.000,00		50.258.000,00		46.258.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20	300	111.040.000,00	20	50.258.000,00	20	50.258.000,00	20	50.258.000,00	20	46.258.000,00		
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				91.892.500,00		180.860.000,00		210.105.000,00		226.080.000,00		226.655.000,00		
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				91.892.500,00		180.860.000,00		210.105.000,00		226.080.000,00		226.655.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	100	100	91.892.500,00	100	180.860.000,00	100	210.105.000,00	100	226.080.000,00	100	226.655.000,00	3.30.2.07.3.32.01.00 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	
3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				91.892.500,00		180.860.000,00		210.105.000,00		226.080.000,00		226.655.000,00		
transmigran yang terfasilitasi pemberangkatan dan penempatannya	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	2	4	91.892.500,00	5	180.860.000,00	7	210.105.000,00	9	226.080.000,00	10	226.655.000,00		
	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	90	225				350				500			500

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	2	4		5		7		9		10					
	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	0	0		2		2		2		2					
	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	2	4		5		7		9		10					
3.32.03.2.01.0004 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				60.660.000,00		138.005.000,00		150.895.000,00		165.895.000,00		165.895.000,00				
Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	2	4	60.660.000,00	5	138.005.000,00	7	150.895.000,00	9	165.895.000,00	10	165.895.000,00				
3.32.03.2.01.0008 - Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat				225.000,00		2.920.000,00		3.650.000,00		3.650.000,00		3.650.000,00				
Terlaksananya Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	2	4	225.000,00	5	2.920.000,00	7	3.650.000,00	9	3.650.000,00	10	3.650.000,00				
3.32.03.2.01.0010 - Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal				27.895.000,00		29.210.000,00		43.260.000,00		43.260.000,00		43.260.000,00				
Terlaksananya Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	90	225	27.895.000,00	350	29.210.000,00	500	43.260.000,00	500	43.260.000,00	500	43.260.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(01)	(02)	(03)
3.32.03.2.01.0016 - Cek Kesehatan Calon Transmigran				3.112.500,00		4.725.000,00		6.300.000,00		7.275.000,00		7.850.000,00		
Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	2	4	3.112.500,00	5	4.725.000,00	7	6.300.000,00	9	7.275.000,00	10	7.850.000,00		
3.32.03.2.01.0020 - Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi				-		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	0	0	-	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00		

4.2. SubKegiatan Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Terdapat program/kegiatan/subkegiatan prioritas untuk mendukung tujuan dan sasaran yang hendak dicapai seperti dalam tabel

4.3 berikut :

Tabel 4.3
SubKegiatan Prioritas Yang Mendukung Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
			Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya omset pasar rakyat	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
3.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya validitas data distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pameran Dagang Nasional	
			Misi Dagang bagi Pelaku Ekspor Unggulan	
5.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib ukur Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
6.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya pemasaran produk IKM	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
7.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

No. (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/Subkegiatan (4)	Ket (5)
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
8.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Bidang Perdagangan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	
			Pengembangan Industri Kreatif	
		Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di UPT Balai Latihan Kerja	Adat,Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			Pengembangan Ekonomi Perempuan	
9.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Capaian dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
10.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
11.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
			Perluasan Kesempatan Kerja	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			Job Fair/Bursa Kerja	
12.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya perlindungan bagi pekerja	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
13.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	
			Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	
			Cek Kesehatan Calon Transmigran	
			Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	

4.3. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul ini ditampilkan dalam Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks daya saing sektor perdagangan dan tenaga kerja	indeks	78,73	79,24	79,95	80,71	81,52	82,38	
2.	PDRB Sektor Perdagangan	persen	8.66-8.84	8.68-8.89	8,70-8.94	8,72-8,99	8,74-9,04	8,76-9,09	
3.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	persen	62,2	63	64,2	65,5	66,9	68,4	

4.4. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja menetapkan target indikator kinerja kunci sebagai acuan evaluasi kinerja pemerintah daerah yaitu seperti table 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	persen	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	persen	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulangdalam tahun berjalan	persen	12,42	12,73	13,33	13,94	14,55	15,15	
4.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	persen	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	
5.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	persen	1.926.528,34	1.973.144,90	2.020.953,59	2.069.985,64	2.120.273,10	2.171.848,89	
6.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	persen	22,07	22,76	23,45	24,14	24,83	25,52	
7.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	persen	62,2	63	64,2	65,5	66,9	68,4	

BAB V PENUTUP

Pengembangan usaha sektor perdagangan bukan hanya tanggungjawab pemerintah akan tetapi juga tanggungjawab pemangku kepentingan lainnya diantaranya lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama. Oleh karena itu sinergitas antara kedua pemangku kepentingan menjadi hal yang penting. Dengan adanya Perubahan Renstra ini diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sektor perdagangan dapat menjadi lebih tepat sasaran, serta lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul.

Renstra ini menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang tertulis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Rencana jangka menengah dalam Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi kedalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk tahun 2026 hingga tahun 2030 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi disetiap tahun. Dengan demikian penjabaran Perubahan Renstra kedalam Renja SKPD atau dokumen-dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang ditetapkan.

KEPALA,

KELIK YUNANTORO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

METADATA IKU-IKD-IKK
DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SAT.	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KET.
(01)	(02)	(03)					(11)
3.30.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja							
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Indeks daya saing sektor perdagangan dan tenaga kerja	Indeks	Mengukur kinerja perdagangan dan tenaga kerja di Kabupaten Gunungkidul	(Rasio PDRB Sektor Perdagangan x 50%) + (Persentase tenaga kerja yang ditempatkan x 50%)	Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi daya saing sektor perdagangan dan tenaga kerja	Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja	
2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	Mengukur persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota dengan cara membandingkan antara jumlah keseluruhan pencari kerja yang wajib melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota bahwa yang bersangkutan telah diterima bekerja dan ditempatkan di dalam maupun di luar negeri dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar yaitu jumlah keseluruhan pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja di wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari kerja yang terdaftar X 100%	Semakin tinggi nilai semakin tinggi tenaga kerja yang ditempatkan	Bidang Tenaga Kerja, Disdagnaker	

3	PDRB Sektor Perdagangan	%	Proporsi PDRB Perdagangan adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang meliputi : 1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya, dan2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.	Nilai tambah Perdagangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Gunungkidul dibagi dengan nilai PDRB Kabupaten dikalikan 100%	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait perdagangan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB regional, ceteris paribus.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	%	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.	TPAK = (Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia Kerja) * 100% Jumlah Angkatan Kerja: Penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan Jumlah Penduduk Usia Kerja: Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas	TPAK memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi tenaga kerja yang tersedia dan seberapa aktif penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi	Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul	IKD RPJMD
5	Ekspor Barang/Jasa (Miliar Rupiah)	Rp	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas dengan cara membandingkan jumlah koperasi yang masih aktif dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun, meningkatnya volume usaha dan aset terhadap jumlah seluruh koperasi yang masih aktif sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun.	Rumus Perhitungan : (Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha, dan aset ÷ Jumlah seluruh koperasi aktif) × 100%	Semakin tinggi nilai maka koperasi semakin berkualitas	Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM	IKD RPJMD

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)	%	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.	Cakupan Jamsos Naker = (Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan/Jumlah semesta penduduk bekerja) X 100% Dimana: Peserta = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah Semesta penduduk bekerja = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas.	IUP RPJPD IKD RPJMD

2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+,p)}} \times 100\%$ Keterangan: TPAKp = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAKp = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) P(15+,p) = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	IUP RPJPD IKD RPJMD
---	---	---	--	--	---	--	------------------------------

3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul	IUP RPJPD IKD RPJMD
---	----------------------------------	---	---	---	--	---	------------------------------

1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	Mengukur persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	(Jumlah pencari kerja yang ditempatkan/jumlah pencari kerja yang terdaftar) X 100% Pembilang Jumlah keseluruhan pencari kerja yang wajib melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota bahwa yang bersangkutan telah diterima bekerja dan ditempatkan di dalam maupun di luar negeri. Penyebut Jumlah Pencaker yang terdaftar adalah jumlah keseluruhan pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja di wilayah kabupaten/kota.	Semakin tinggi nilai semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan	Bidang Tenaga Kerja, Disdagnaker	
---	---	---	--	---	---	----------------------------------	--

2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja.	(PDRB Tahun Berjalan atas dasar harga konstan/Jumlah tenaga kerja) Pembilang Jumlah keseluruhan PDRB (atas dasar harga konstan dalam satuan rupiah utuh) Kabupaten/Kota pada Tahun Pelaporan. Penyebut Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita pada sektor formal maupun informal di wilayah Kabupaten/Kota	Semakin tinggi nilai semakin tinggi produktivitas tenaga kerja	Bidang Tenaga Kerja, Disdagnaker	
---	------------------------------------	----	--	---	--	----------------------------------	--

3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja. Pembilang Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan mengacu Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang merupakan hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja (PTK) Kabupaten/Kota yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. Penyebut keseluruhan jumlah kegiatan yang dilaksanakan baik yang mengacu dan tidak mengacu RTKD oleh perangkat daerah bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota	(Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTKD/Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota) X 100%	Semakin tinggi nilai semakin tinggi jumlah kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Bidang Tenaga Kerja, Disdagnaker	
---	--	---	--	---	--	----------------------------------	--

4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	Mengukur persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	(Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/Jumlah perusahaan) X 100% Pembilang Jumlah perusahaan yang wajib memiliki 3 (tiga) syarat kelayakan, yaitu Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan yang memiliki pegawai diatas 50 orang wajib membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Penyebut Jumlah Keseluruhan Perusahan yang terdaftar di Wilayah Kabupaten/Kota	Semakin tinggi nilai semakin tinggi jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Bidang Tenaga Kerja, Disdagnaker	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk dengan membandingkan keseluruhan jumlah pupuk besubsidi yang disalurkan kepada kelompok tani/perorangan petani dengan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun (RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelomp	(Realisasi pupuk/RDKK) X 100%	Semakin tinggi nilai semakin tinggi jumlah serapan pupuk bersubsidi yang diterima petani	Bidang Perdagangan, Disdagnaker	

2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	Mengukur persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku dengan membandingkan jumlah UTTP yang sudah ditandai dengan tanda tera yang sah oleh petugas tera berdasar pengujian dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UTTP yg wajib ditea/tera ulang	(Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan/Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera/tera ulang) X 100%	Semakin tinggi nilai semakin tinggi jumlah alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yang telah ditera	UPT Metrologi Legal, Disdagnaker	
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	Persentase pelaku usaha (pusat perbelanjaan/toko swalayan) yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang masih berlaku	(Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan /Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar) X 100%	Semakin tinggi nilai semakin tinggi jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Bidang Perdagangan, Disdagnaker	

METADATA PROGRAM DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2025-2029							
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						
	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Bidang Perdagangan	Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerjasama istimewa	Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dengan memberikan fasilitasi promosi produk-produk	Jumlah umkm/ikm yang mengikuti pameran produk potensi daerah	Semakin tinggi nilai semakin banyak umkm/ikm yang memperoleh fasilitas promosi produk	Bidang Perdagangan, Disdagnaker	3.30.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di UPT Balai Latihan Kerja	Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerjasama istimewa	Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dengan memberikan pelatihan angkatan kerja perempuan	Jumlah angkatan kerja perempuan yang mengikuti pelatihan	Semakin tinggi nilai semakin banyak angkatan kerja perempuan yang mendapat kesempatan pelatihan	Bidang Tenaga Kerja, Disdagnaker	3.30.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						

2	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						
	Capaian dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja. Pembilang Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan mengacu Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang merupakan hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja (PTK) Kabupaten/Kota yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. Penyebut keseluruhan jumlah kegiatan yang dilaksanakan baik yang mengacu dan tidak mengacu RTKD oleh perangkat daerah bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota	(Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTKD/Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota) x 100%	Semakin tinggi nilai semakin tinggi jumlah kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Bidang Tenaga Kerja, Disdagnaker	3.30.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja

3	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
	Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Persentase kelulusan peserta pelatihan vokasi (%)	Mengukur tingkat kelulusan peserta pelatihan	(Jumlah peserta pelatihan yang lulus/jumlah seluruh peserta pelatihan) X 100%	Semakin tinggi nilai semakin tinggi tingkat keberhasilan pelatihan	Bidang Tenaga Kerja, Disdagnaker	3.30.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
4	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja (%)	Mengukur tingkat pertumbuhan penempatan tenaga kerja	(persentase penempatan tenaga kerja Tahun N) - (persentase penempatan tenaga kerja tahun N-1)	Semakin tinggi nilai semakin tinggi pertumbuhan penempatan tenaga kerja, semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Bidang Tenaga Kerja, Disdagnaker	3.30.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
5	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
	Meningkatnya perlindungan bagi pekerja	Persentase pekerja yang mendapat perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (%)	Mengukur persentase pekerja yang mendapat perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	((Jumlah mediator X jml perusahaan yang disosialisasikan X 12 bulan X 50 orang/perusahaan)/Jumlah seluruh pekerja)) X 100%	Semakin tinggi nilai semakin tinggi jumlah pekerja perusahaan yang mendapat perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Bidang Tenaga Kerja, Disdagnaker	3.30.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						

6	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	3.30.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
7	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Yang Diawasi (%)	menghitung persentase perizinan perusahaan yang diawasi	(Jumlah perizinan perusahaan yang diawasi pada tahun N/Target perizinan perusahaan yang diawasi pada tahun N) X 100%	semakin tinggi nilai semakin tinggi jumlah perusahaan yang bisa diawasi perizinannya	Bidang Perdagangan, Disadgnaker	3.30.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
8	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						

	Meningkatnya omset pasar rakyat	Persentase pertumbuhan Omset pasar rakyat (%)	mengukur persentase pertumbuhan omset pedagang pasar rakyat	$\frac{(((\text{Omset pedagang N}) - (\text{Omset pedagang N-1})) / (\text{Omset pedagang N-1})))}{X} \times 100\%$	Semakin tinggi nilai semakin tinggi pertumbuhan omset pedagang pasar rakyat	Bidang Pengelolaan Pasar, Disdagnaker	3.30.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
9	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						
	Meningkatnya validitas data distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	Mengukur persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	$\frac{(\text{Jumlah data harga Bapkotting yang ada} / \text{Jumlah data harga Bapokting yang dibutuhkan})}{X} \times 100\%$	Semakin tinggi nilai semakin tinggi tingkat ketersediaan data harga Bapokting	Bidang Perdagangan, Disdagnaker	3.30.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
10	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						
	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase pelaku usaha berorientasi ekspor (%)	Mengukur persentase pelaku usaha yang berorientasi ekspor	$\frac{(\text{Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen untuk menjadi pelaku usaha yang berorientasi dibagi jumlah pelaku usaha yang mendapat pelatihan ekspor pada tahun N})}{X} \times 100\%$	Semakin tinggi nilai semakin tinggi jumlah pelaku usaha yang berkomitmen menjadi pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Bidang Perdagangan, Disdagnaker	3.30.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
11	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						

	Meningkatnya tertib ukur Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan	Persentase UTTP Yang Ditera/Tera Ulang (%)	Mengukur persentase alat UTTP yang telah ditera/tera ulang	(Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan/Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera/tera ulang) X 100%	Semakin tinggi nilai semakin tinggi jumlah alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yang telah ditera	UPT Metrologi Legal, Disdagnaker	3.30.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
12	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
	Meningkatnya pemasaran produk IKM	Persentase peningkatan omset IKM (%)	Mengukur tingkat pertumbuhan omset IKM yang diintervensi promosi/pemasarannya	((Omset IKM setelah diintervensi - omset IKM sebelum diintervensi)/Omset IKM sebelum diintervensi)) X 100%	Semakin tinggi nilai semakin tinggi pertumbuhan omset IKM	Bidang Perdagangan, Disdagnaker	3.30.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
13	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						
	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (%)	Mengukur persentase transmigran yang berhasil dipindahkan dan ditempatkan	(Jumlah Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan / Jumlah target transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan pada tahun N) X 100%	Semakin tinggi nilai semakin tinggi tingkat keberhasilan menempatkan dan memindahkan transmigran	Bidang Tenaga Kerja, Disdagnaker	3.30.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja

